# BAB V

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. Kesimpulan

Berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diformulasikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan di bawah ini dibuat sesuai dengan urutan butir-butir pertanyaan seperti yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya:

1. Keberadaan tunanetra di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif merupakan salah satu kondisi nyata dari implementasi pendidikan inklusif yang sudah dicanangkan pemerintah. Dalam mengikuti pendidikan di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif, mereka menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Dalam pembelajaran dan tugas-tugas yang harus diselesaikan, mereka menghadapi kesulitan dalam memahami keseluruhan penjelasan dari guru terutama penjelasan atau tugas yang memerlukan kesan visual. Aksesibilitas lingkungan belajar dan sumber belajar, misalnya penggunaan fasilitas sekolah dan ketersediaan buku-buku pelajaran, merupakan beberapa kendala lainnya ketika mereka di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif. Keterampilan orientasi dan mobilitas merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh tunanetra, dengan memiliki keterampilan ini tunanetra dapat melakukan interaksi dengan baik di lingkungannya, juga sebagai modal dasar dalam melakukan penyesuaian sosial di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif.
2. Ditinjau dari perspektif guru, asesmen merupakan tindakan yang sebaiknya

pertama kali dilakukan sebelum melakukan pembelajaran terhadap siswa tunanetra. Berdasarkan hasil asesmen ini guru akan memahami betul potensi yang dimiliki anak, kekurangan anak, dan kebutuhan pembelajaran anak. Dalam beberapa konsep-konsep bimbingan dan konseling, nampaknya guru sudah mulai menerapkan hasil asesmen ini dalam pembelajaran. Mereka berpendapat bahwa informasi dari tunanetra sangat penting dan mereka bisa memilah dan memilih, mana informasi yang harus di *share* dengan orang lain dan mana yang harus dirahasiahkan. Para guru juga menerima siswa tunanetra apa adanya, bahkan memfasilitasi tunanetra untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan di kelasnya. Mereka yakin bahwa keterlibatan tunanetra dalam berbagai aktifitas dapat menumbuhkan keyakinan dan kemandirian individu tunanetra. Para guru yakin bahwa pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi tunanetra harus menganut prinsip keterpaduan dan keharmonisan, karena dengan membawakan salah satu peran dari berbagai konsep-konsep bimbingan dan koseling dapat menjadikan bahan masukan yang berarti bagi guru untuk menangani siswa tunanetra di kelasnya. Mereka memahami bahwa konseling harus ditangani oleh ahlinya, dan referal merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk menerima atau mengirim siswa yang tidak mampu ditanganinya.

3. Layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor kepada siswa tunanetra di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif secara substansial belum menyentuh aspek ketunanetraannya. Meskipun demikian para siswa tunanetra di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif sudah merasakan layanan bimbingan dan konseling baik berupa pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual, maupun pelayanan dukungan sistem. Pelayanan dasar merupakan bentuk layanan yang menjadi

fokus perhatian bagi siswa tunanetra di sekolah inklusif. Karena ketunanetraannya mereka menghadapi berbagai permasalahan ketika mengikuti pendidikan dalam seting inklusi, permasalahan tersebut sangat variatif terutama yang berhubungan dengan bidang pribadi-sosial, akademik, dan karir.

4. Hasil penelitian yang berhubungan dengan kebutuhan siswa tunanetra akan layanan bimbingan dan konseling di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa tunanetra menginginkan terfasilitasinya mereka oleh guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang pribadi-sosial, akademik, dan karir. Dengan bantuan guru bimbingan dan konseling mereka mengharapkan dapat merumuskan tujuan hidup, merancang masa depan, dan membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan perencanaan masa depannya. Secara umum para siswa tunanetra mengharapkan adanya kontribusi yang positif dari guru bimbingan dan konseling dalam memfasilitasi mereka menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat.
5. Dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap tunanetra didukung oleh data yang diperoleh dari guru dan konselor serta sesuai dengan permasalahan nyata yang dihadapi oleh siswa tunanetra dalam mengikuti pendidikan di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif, maka rumusan program bimbingan dan konseling bagi tunanetra dalam seting ini dibagi ke dalam tiga bagian sesuai dengan temuan-temuan sebelumnya, yaitu: program bimbingan pribadi-sosial, akademik, dan karir. *Program bimbingan pribadi-sosial,* isi program menekankan pada penyediaan konsultasi dalam membantu siswa tunanetra untuk memahami posisi diri secara wajar dan peluang yang ada dalam lingkungan perkembangan, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkan

rasa percaya diri yang wajar untuk dimilikinya perilaku adaptif pada tunanetra. *Program bimbingan akademik*, isi program menekankan pada penyediaan konsultasi untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, mencari dan menggunakan buku sumber atau referensi lainnya, dan menumbuhkan motivasi kepada siswa tunanetra yang berada di ujung keputusasaan akibat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. *Program bimbingan karir*, isi program menekankan pada pemberian layanan informasi mengenai Perguruan Tinggi (PT), langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam memasuki PT, dan cara-cara belajar di PT serta pemberian informasi tentang berbagai pekerjaan yang memungkinkan untuk dapat dimasuki oleh siswa tunanetra, seperti bekerja sebagai tenaga operator, penterjemah, guru, pemijat, pemusik, peternak, petani, dan sebaginya. Adapun strategi intervensi dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: (1) peningkatan efektifitas fungsi konselor dalam mengungkap permasalahan dan kebutuhan individual siswa, (2) usaha sinergi peran guru atas dasar masalah yang dihadapi oleh siswa, dan (3) kolaborasi dengan orang tua, guru orientasi dan mobilitas, pekerja sosial, dokter, atau tenaga lainnya apabila ada masalah teknis yang berhubungan dengan ketunanetraan.

6. Perenapan konsep-konsep bimbingan dan konseling dalam pembelajaran siswa tunanetra di sekolah inklusif sangat bekontribusi positif terhadap para siswa tunanetra. Dengan penerapan konsep-konsep bimbingan dan konseling yang diterapkan dalam pembelajaran, mereka merasa nyaman, aman, termotivasi, serta semakin percaya diri, bahwa dirinya bisa berbuat sesuatu sekecil apapun yang dapat mereka lakukan. Akhirnya muncul pada diri mereka keinginan

membangun sikap hidup mandiri untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

B. Rekomendasi

1. Layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus merentang dari yang bersifat segregatif, integratif, sampai inklusif. Dari ketiga bentuk layanan tersebut, tunanetra selalu menjadi peserta didik yang pertama kali terlibat di dalamnya. Tahun 1901 SLB yang pertama kali didirikan adalah SLB bagi tunanetra di Bandung. Pendidikan integrasi yang mulai diperkenalkan oleh HKI di Indonesia pada tahun 1978, *pilot project*-nya fokus ke siswa tunanetra. Demikian juga halnya dengan pendidikan inklusif pada tahun 2000-an melalui program *Braillo*-nya dimulai dengan tunanetra. Dari perjalanan panjang tersebut, nampaknya belum pernah ada program layanan bimbingan dan konseling yang secara khusus diperuntukkan bagi tunanetra. Padahal kalau kita lihat permasalahan yang dihadapi oleh tunanetra ketika berada dalam seting manapun selalu ada, baik yang disebabkan karena alasan internal maupun eksternal. Dari penelitian ini terungkap, bahwa guru bimbingan dan konseling sudah memberikan layanan kepada tunanetra tetapi secara substansial belum menyentuh aspek ketunanetraannya. Dalam implementasi pendidikan inklusif keberadaan tunanetra di sekolah umum lambat atau cepat, sedikit atau banyak, pasti akan ditemukan dan harus dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling. Sehubungan dengan itu untuk mempersiapkan calon guru bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan dan tututan lapangan dewasa ini, terutama dalam konteks inklusi, pendidikan guru dalam jabatan *(pre-service training)* perlu untuk melakukan reorientasi kurikulumnya. Dalam kurikulum pendidikan

guru sebaiknya terkandung materi pendidikan inklusif sebagai salah satu upaya pengembangan kompetensi guru sesuai dengan tuntutan lapangan.

2. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 4 Ayat (1) mengemukakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Konsekuensi dari adanya Permendiknas ini adalah bagaimana kesiapan para guru, khususnya guru bimbingan dan konseling, di sekolah yang ditunjuk. Oleh karena itu nampaknya Dinas Pendidikan harus terlebih dahulu mempersiapkan para gurunya termasuk guru bimbingan dan konseling melalui program *In-service Training* tentang pendidikan inklusif.
3. Kepala sekolah inklusif dituntut untuk lebih kreatif dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pendidikan inklusif adalah pentingnya membangun jejaring *(networking)*. Dalam strategi intervensi yang diformulasikan di atas, bahwa strategi kolaboratif merupakan salah satu yang perlu dilakukan dalam melakukan intervensi kepada siswa tunanetra. Dalam strategi ini diperlukan pendekatan integratif dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak, misalnya: orang tua, instruktur O&M, ahli low vision, dan sebagainya.
4. Dari hasil penelitian terungkap, bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor kepada siswa tunanetra di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif secara substansial belum menyentuh aspek ketunanetraannya. Hal ini bisa difahami karena seorang konselor belum dibekali

dengan pengetahuan tentang ketunanetraan. Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya kondisi yang dapat mengembangkan substansi ketunanetraan bagi guru dan konselor.

5. Keberadaan tunanetra di sekolah penyelenggara perintis pendidikan inklusif perlu diperhatikan aspek mobilitas dalam interaksi dengan guru, teman sebaya, dan personel lainnya di sekolah. Interaksi dengan teman sebaya di sekolah akan sangat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan siswa tunanetra, baik dalam hal peningkatan sosialisasi, pengembangan konsep, dan akhirnya terhadap rasa percaya diri siswa tunanetra. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling sebagai inti dalam melakukan kolaborasi dan sosialisasi tunanetra dengan berbagai pihak, harus berperan sebagai *social engineer*.
6. Implementasi pendidikan inklusif merentang pada semua jenjang pendidikan. Demikian juga keberadaan siswa tunanetra akan merentang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh siswa tunanetra dan keluarganya tidak dirasakan hanya oleh siswa tunanetra dan keluarga yang berada di jenjang sekolah menengah atas. Sehubungan dengan itu untuk membantu siswa dan keluarga tunanetra perlu adanya guru bimbingan dan konseling di setiap jenjang pendidikan atau berdomisili di satu sekolah sebagai pusat layanan konseling *(counselling center)* dengan membawahi beberapa sekolah di suatu daerah dengan menjalankan fungsi sebagai konselor kunjung *(itinerant counsellor)*. Kondisi ini diharapkan dapat mengembangkan program bimbingan dan konseling inklusif yang dapat mengakomodasi semua tanpa terkecuali.